Edisi : Vol. I No. III	Jurnal Sains Ekonomi Dan Bisnis	September - Desember 2017	ISSN : 2548 - 9690
---------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------

JURNAL SAINS EKONOMI DAN BISNIS

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pada PT. Hadji Kalla di Makassar

Adrianus Surianto Gerikallo

Menata Masyarakat Prasejahtera Dalam Penguatan Ekonomi Di Kota Makassar

Zulfikry Sukarno

Analisis Penerapan Fungsi Manajemen Pada Program Penyediaan Air Minum Di Desa Mattirowalie Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo

Syamsir

Analisis Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Lembaga Organisasi Pemerintah Dan Organisasi Profit

Bunyamin

Implementasi Terhadap Pelaku Ekonomi Dalam Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi Megawaty

Pengaruh Tekanan Ketaatan, Senioritas Auditor, Tekanan Anggaran Waktu Dan Kompleksitas Tugas Terhadap Audit *Judgment* Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Kota Makassar

Muhammad Faisal Arif

Analisis Manajemen Perkantoran Pada Kantor Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo

Darwis

Analisis Dan Keunggulan Economic Value Added (EVA) Pada PT. United Tractors,Tbk

Bakhtiar

Pengaruh Sinyal Fundamental Dan Informasi Komponen Arus Kas Terhadap Return Saham

Asri Djaya

Analisis Kartu Kredit Macet Pada Pt Bank Negara Indonesia BNI 1946 Tbk Cabang Makassar

Rahmawaty Umar

Analisis Transparansi Dalam Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Di Kabupaten Maros

Muhammad Nur

Apakah Corporate Governance Berpengaruh Terhadap Earning Management?

:Fakta Dari Industri Manufaktur Di Indonesia

Ripa Fajarina Laming

JURNAL SAINS EKONOMI DAN BISNIS

**Penanggung Jawab
Dr. Syamsuddin., SE. MM.**

**Pemimpin Redaksi
William S. Limoa. SE. M.Si**

**Mitra Bebestari
Prof. Dr. H. Sangkala. MA (Universitas Hasanuddin)
Prof. Dr. H. Rahman Kadir. M.Si (Universitas Hasanuddin)
Prof. Dr. H. Achmad Musseng, SE, M.Si (STIE YPUP)
Dr. Mawardi., SE, M.Si (Politeknik Ujung Pandang)
Dr. Teddy Hikmah Fauzih., SE., M.Si (Universitas Pasundan Bandung)**

**Editor
Dr. Zulkarnain Umar., M.Si**

**Desain Grafis
Ir. Muhammad Yusri Lukman. MT, PhD**

**Bendahara
Hj. Ratna Juwita, SE**

**Staf Redaksi
Ir. Harmaini mannan
Ilham Idrus, ST. MT**

**Distribusi
Rama Eka Batara
Hutama Agung Wangsyah**

**Alamat Redaksi
Pusat Kajian Sains Indonesia
Jln. Rappocini Raya Lr. VI No. 14 Telepon (0411) 8911001 Makassar
Email : sains.indonesia@yahoo.com Email Pendidikanjurnal@yahoo.com
www.jurnalscienceindonesia.com**

KATA PENGANTAR

Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya jurnal Sains Ekonomi dan Bisnis edisi Vol. I No. III September - Desember 2017 yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Sains Indonesia, sehingga terbitlah jurnal/karya ilmiah dari para kalangan akademisi yang telah mendharma baktikan ilmu pengetahuannya khusus dalam bidang ilmu ekonomi dan merupakan sebagai salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi dan Bisnis, edisi ini telah memuat karya ilmiah atau jurnal yang berkualitas, baik dalam bentuk penelitian maupun dalam bentuk karya ilmiah dari para akademisi serta praktisi dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, semoga karya ilmiah atau jurnal ini sangat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca serta peminat jurnal Sains Ekonomi Dan Bisnis, keduabelas karya ilmiah atau jurnal tersebut dengan mengangkat masalah kajian-kajian bidang ekonomi, serta kebijakan tentang ekonomi.

Demikian pengantar dari redaksi jurnal Sains Ekonomi Dan Bisnis oleh Pusat Kajian Sains Indonesia, yang sebagai manusia biasa terdapat kekurangan dalam jurnal ini, maka saran dan kritikan yang sifatnya membangun, untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis jurnal karya ilmiah serta para personal jurnal Sains Ekonomi Dan Bisnis, semoga mendapat amal dari Allah SWT. Insya Allah Amin.

Pemimpin redaksi

DAFTAR ISI

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pada PT. Hadji Kalla di Makassar

Adrianus Surianto Gerikallo 179 - 187

Menata Masyarakat Prasejahtera Dalam Penguatan Ekonomi Di Kota Makassar

Zulfikry Sukarno 188 - 194

Analisis Penerapan Fungsi Manajemen Pada Program Penyediaan Air Minum Di Desa Mattirowalie Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo

Syamsir 195 - 201

Analisis Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Lembaga Organisasi Pemerintah Dan Organisasi Profit

Bunyamin 202 - 208

Implementasi Terhadap Pelaku Ekonomi Dalam Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi

Megawaty 209 - 215

Pengaruh Tekanan Ketaatan, Senioritas Auditor, Tekanan Anggaran Waktu Dan Kompleksitas Tugas Terhadap Audit *Judgment* Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Kota Makassar

Muhammad Faisal Arif 216 - 223

Analisis Manajemen Perkantoran Pada Kantor Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo

Darwis 224 - 228

Analisis Dan Keunggulan Economic Value Added (EVA) Pada PT. United Tractors, Tbk

Bakhtiar 229 - 233

Pengaruh Sinyal Fundamental Dan Informasi Komponen Arus Kas Terhadap Return Saham

Arsi Djaya 234 - 241

Analisis Kartu Kredit Macet Pada Pt Bank Negara Indonesia Bni 1946 Tbk Cabang Makassar

Rahmawaty Umar 242 - 245

Analisis Transparansi Dalam Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Di Kabupaten Maros

Muhammad Nur 246 - 253

Apakah Corporate Governance Berpengaruh Terhadap Earning Management? : Fakta Dari Industri Manufaktur Di Indonesia

Rina Faiarina Laming 254 - 259

MENATA MASYARAKAT PRASEJAHTERA DALAM PENGUATAN EKONOMI DI KOTA MAKASSAR

Zulfikry Sukarno

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen (STIEM) Bongaya

fikry.hawk@gmail.com

Abstrak

Penelitian untuk mengetahui serta menjawab tentang menata masyarakat prasejahtera dalam penguatan ekonomi di Kota Makassar, adapun jenis penelitian adalah kualitatif serta deskriptif tentang masyarakat terhadap prasejahtera dengan melalui pendekatan fenomenologi. dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan di susun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berarti dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan dilakukan penentuan prioritas berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan sehingga implementasi program akan terlaksana secara efektif dan efisien. melalui pemberdayaan, masyarakat akan mampu menilai lingkungan sosial ekonominya serta mampu mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu dilakukan perbaikan. tahapan selanjutnya dari pemberdayaan adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri berkelanjutan. mandiri adalah langkah lanjut yang rasional dari masyarakat yang telah Sejahtera.

Kata kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, Otonomi Daerah, Kemiskinan*

Pendahuluan

Kemiskinan sesungguhnya telah menjadi masalah dunia sejak berabad-abad lalu. Namun, realitasnya hingga kini kemiskinan masih menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di dunia ini. Teknologi boleh semakin maju, negara-negara merdeka semakin banyak, dan negara-negara kaya boleh saja kian bertambah. Tetapi, jumlah orang miskin di dunia tak kunjung berkurang. Kemiskinan bahkan telah bertransformasi menjadi wajah teror yang menghantui dunia. Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnyanya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Di Indonesia kemiskinan merupakan fenomena yang sudah ada sejak zaman pra reformasi, sampai masa reformasi saat ini. Ini merupakan masalah yang signifikan yang sedang dihadapi oleh pemerintah

kita pada saat ini. Begitu banyak upaya pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan demi mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut, akan tetapi, kemiskinan masih saja belum bisa diatasi sepenuhnya oleh pemerintah. Secara universal kemiskinan di Indonesia bisa diidentifikasi menjadi dua kategori: kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kedua jenis kemiskinan ini sangat berkaitan. kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang sifatnya teologis, lebih bertumpu pada mental dan spiritual. Artinya kemiskinan kultural ini tidak disebabkan oleh kurangnya materi atau kekayaan, tetapi lebih disebabkan oleh krisis mental dan rapuhnya teologi seseorang. Secara materi penderita kemiskinan kultural ini sebenarnya sudah tidak menjadi masalah. Tetapi meskipun hidupnya sudah bergelimang harta, mental dan jiwanya selalu merasa kurang (miskin). Kerakusan dan nafsu tak kenal puas benar-benar menguasai hidupnya (Wrihatnolodan Dwidjowijoto 2007). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis modal sosial masyarakat kota dalam menunjang peningkatan pendapatan khususnya terhadap tentang kemiskinan, disamping suplai melalui program-

program yang terus digulirkan pemerintah. Hal-hal yang berkaitan terhadap interaksi dalam masyarakat yang kemudian dapat melahirkan modal sosial itu sendiri, seperti yang sering ditunjukkan akhir-akhir ini tentang keadaan masyarakat cukup miris, dimana faktor cultural mulai menunjukkan indikasi melemah, semangat gotong royong mulai menghilang, kebersamaan menjadi "individualistik", keengganan untuk berpartisipasi, bergaul dan sebagainya. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu terungkap seberapa besar faktor kultural (dalam hal ini modal sosial) akan mempengaruhi suatu kinerja dalam upaya-upaya pembangunan, tentunya dengan harapan adanya pengentasan kemiskinan juga sebagai efek luasnya. Kemudian juga, Konsep pendidikan untuk tentang pengentasan kemiskinan mempunyai dua makna.

Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam penguatan ekonomi Di Kota Makassar; 2) Faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat prasejahtera dalam penguatan ekonomi di Kota Makassar

Tinjauan Pustaka

Kemiskinan

Kemiskinan memiliki sifat plural sehingga kemiskinan telah menunjukkan adanya sekelompok orang yang serba kekurangan. Masyarakat subsisten yang tidak berpenghasilan atau berpenghasilan tapi rendah, bisa jadi tidak merasa miskin karena mereka merasa sudah terpenuhi kebutuhannya. Sebaliknya penduduk urban yang berpenghasilan sedang, mungkin merasa selalu kekurangan karena gaya hidup hedonis yang mereka jalani, atau lingkungan budaya tidak sehat yang mereka hadapi (misalnya perangkap narkoba ataupun judi). Dalam hal ini meski kelihatannya mereka berkecukupan, namun mereka selalu merasa kekurangan, mereka bisa dikatakan miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan dengan standar garis kemiskinan (*poverty line*) makanan dan non makanan. Garis kemiskinan makanan

yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori per kapita per hari. Sedangkan BKKBN menggunakan satuan rumah tangga untuk dapat mengukur tingkat kemiskinan. Kemiskinan berada pada keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) yang ditandai oleh kesulitan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan non ekonomi. Di samping merujuk kepada individu dan rumah tangga penduduk miskin, ukuran kemiskinan juga dengan pendekatan melalui pengamatan daerah miskin.

Teori dasar kemiskinan dan teori pengentasannya

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai tingkat kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Untuk memahami pengertian tentang kemiskinan ada sebagai pendapat yang dikemukakan. Menurut Suparlan (1995), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Sedangkan menurut Bank Dunia kemiskinan adalah apabila pendapatan seseorang kurang dari US\$1 per hari (setara Rp13.000,00 per hari). Menurut Biro Pusat Statistik (BPS): tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(2009) menjelaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Pendapat lain dikemukakan oleh Setyawan (2009) yang menyatakan kemiskinan adalah adanya gap atau jurang antara nilai-nilai utama yang diakumulasi dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai-nilai tersebut secara layak. Amartya Sen (Arif:1998) menjelaskan bahwa masalah kemiskinan bukan sekedar masalah lebih miskin daripada orang lain dalam masyarakat, melainkan masalah tidak dimilikinya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material secara lain, kegagalan mencapai tingkat kelayakan minimum tertentu, hal ini disebabkan karena kemiskinan dipahami sebagai kegagalan mencapai tingkat kelayakan minimum, maka kriteria kelayakan minimum haruslah ditentukan secara absolut, dengan jumlah yang sama antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain. Selanjutnya Hall dan Midgley (2004), menyatakan bahwa kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat. Sementara John Friedman (1979), mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakseimbangan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) modal yang produktif (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lainnya) sumber-sumber keuangan, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk dapat memperoleh pekerjaan, barang-barang; pengetahuan, keterampilan yang memadai dan informasi yang berguna. Konsekuensi dari kemiskinan adalah tidak adanya pilihan bagi penduduk miskin (*poverty giving most people no option*) untuk

mengakses kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti: kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan ekonomi atas kepemilikan alat-alat produksi yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan. Kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk dapat memenuhi standar kebutuhan hidup minimum, yang meliputi makanan dan non-makanan. Nilai standar kebutuhan minimum makanan mengacu pada harga dan tingkat konsumsi dari 52 jenis makanan yang menghasilkan energi 2100 kalori sedangkan non-makanan terdiri 27 paket komoditi untuk perkotaan dan 25 komoditi untuk pedesaan yang dalam hal ini mewakili pola konsumsi penduduk kelas bawah. Nilai standar kebutuhan minimum digunakan sebagai garis batas kemiskinan atau garis kemiskinan non makanan. Batas kecukupan makanan ditetapkan sebesar nilai pengeluaran untuk makanan yang mampu dengan dapat menghasilkan energi sebesar 2.100 kalori per-kapita per-hari. Sumodiningrat (2001), mengidentifikasi penyebab kemiskinan yang sangat kompleks dan saling terkait, yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah, baik motivasi, maupun penguasaan manajemen, dan teknologi; kelembagaan yang belum mampu menjalankan dan mengawal pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana yang belum merata dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, karena minimnya modal dan berbelitnya prosedur dan peraturan yang ada. Kemiskinan absolut dan relatif adalah konsep kemiskinan yang dapat mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang/keluarga. Kedua istilah itu merujuk pada perbedaan sosial (*social distinction*) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusipendapatan. Perbedaannya adalah pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif, kategorisasi kemiskinan ditentukan berdasarkan

perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk. Kategori ini dapat digunakan untuk mengukur kemiskinan karena konsumsi maupun kemiskinan yang keterbelakangan serta dapat bersifat multidimensi. Dalam penanggulangan masalah kemiskinan melalui program bantuan langsung tunai (BLT), BPS pun telah menetapkan 14(empat belas) kriteria keluarga miskin seperti yang telah disosialisasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (2009), rumah tangga yang memiliki ciri rumah tangga miskin, yaitu: luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang; jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan; jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain, sumber penerangan rumah tangga tidak dapat menggunakan listrik sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar /arang /minyak tanah hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan; pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD sampai SLTP, serta tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000, seperti: sepeda motor (kredit /non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Selanjutnya menurut Nasikun (1995), menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu: *Policy induces processes* yaitu proses

pemiskinan yang dapat dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitasnya justru melestarikan; *Socio-economic dualisme* adalah negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor *Population growth* adalah perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedang pertambahan pangan seperti deret hitung *Recources management and the environment* yakni adanya unsur mis management sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas *Natural cycles and processes* adalah kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, di mana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak dapat memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.

Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Klaim bahwa pertumbuhan ekonomi akan cepat mengurangi kemiskinan telah keburukan sejak 1970 di beberapa tempat, sementara di lain itu telah memegang kekuasaan besar). Dampak terhadap masyarakat miskin yang beragam kemiskinan meningkat di beberapa negara dan jatuh pada orang lain. Berapa banyak dari ini dapat dikaitkan dengan perbedaan dalam tingkat pertumbuhan standar hidup rata-rata dalam Martin Ravallion (1995). Tidaksulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan

Pemberdayaan Masyarakat

Menguatnya isu demokratisasi dan semangat *civil society* menyebabkan masyarakat semakin mendapatkan tempat

yang lebih luas, setidaknya dalam mengemukakan aspirasi dan kebutuhannya yang merupakan fondasi bagi kebijakan pembangunan nasional. Dalam konteks inilah wacana pemberdayaan masyarakat perlu dikontekstualkan kedalam kebijakan pembangunan. Menurut Berger dan Nienhaus (1977), tentang struktur-struktur penghubung (*mediating structures*) yang memungkinkan kelompok-kelompok lemah mengekspresikan aspirasi dan menunjukkan kemampuannya terhadap lingkungan sosial yang lebih luas, kini cenderung melemah. Oleh karena itu, seringkali sistem ekonomi yang diwujudkan dalam pelbagai bentuk pembangunan proyek-proyek fisik, selain mampu meningkatkan kualitas hidup sekelompok orang, tidak jarang malah memarginalkan kelompok-kelompok yang tertentu dalam masyarakat. Menurut Sennet & Cabb dan Conway dalam Aris (2008), ketidakberdayaan disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik maupun emosional.

Metode Penelitian : Jenis penelitian Kualitatif dan deskriptif melalui pendekatan fenomenologi

Hasil Dan Pembahasan

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penguatan Ekonomi Pada Kota Makassar

Bagian ini merupakan agenda yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah, swasta, LSM, Koperasi maupun kelompok masyarakat lainnya yang peduli terhadap pentingnya pemberdayaan masyarakat. Agenda ini merupakan analisis dari tataran teoritis maupun pengalaman praktis di lapangan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia Kota Makassar merupakan modal yang sangat penting dalam melakukan pembangunan. Keterkaitan masalah ini dengan pemberdayaan masyarakat sangat besar. Dampak pemberdayaan masyarakat

adalah kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan mereka melalui prakarsa dan kreatifitas untuk dapat meningkatkan kualitas hidup. Tentunya membutuhkan masyarakat yang memiliki mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk keluar dari permasalahan mereka. Banyak ekonom yang memandang penting investasi sumber daya manusia. Adanya perubahan paradigma bahwa dalam pertumbuhan ekonomi tidak hanya mementingkan akumulasi modal fisik melainkan juga pembentukan modal manusia. Studi Schultz, Harbison, Denson, Kendrick, Moses Abromovits, Becker, Kuznets (Jhingan, 1988) menyatakan bahwa salah satu faktor penting yang menyebabkan tentang pertumbuhan cepat perekonomian Amerika Serikat adalah pembiayaan pendidikan yang secara relatif selalu meningkat. Telaah mengenai peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini adalah masyarakat pedesaan dan institusi kelembagaan sebagai wadah mereka berorganisasi. Para pelaku pemberdaya di tingkat masyarakat Kota Makassar yang selanjutnya sering disebut dengan fasilitator, serta mengembangkan metode pelatihan bagi orang dewasa untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pedesaan. Kunci dari metode pendidikan bagi orang dewasa adalah proses penyadaran melalui penumbuhan kepercayaan diri, yang dapat menumbuhkan rasa membutuhkan pada diri masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup. Rancangan program pelatihan yang disediakan oleh poyek kadang-kadang ditemukan tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok belajar. Seringkali masyarakat membutuhkan ketrampilan teknologi tepat guna yang sesuai dan mudah untuk mengelola sumber daya lokal yang ada. Sedangkan teknologi yang diberikan sulit dipahami penggunaan dan perawatannya. Sasaran utamanya tentunya adalah peningkatan produktifitas masyarakat miskin pedesaan untuk meningkatkan peluang dan kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik.

Dengan berkembangnya konsep *gender and development*, perhatian proses peningkatan kapasitas masyarakat sudah semakin merata baik terhadap laki-laki dan perempuan. Dorongan yang kuat karena kesetaraan akan membangun relasi yang adil, maka kesempatan pendidikan peluangnya sama bagi laki-laki dan perempuan. Walaupun sering berbenturan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Penanggulangan kemiskinan di era otonomi daerah mengandung pelajaran tentang peluang serta penanggulangan kemiskinan, baik dari bentuk lama yang disusun di pemerintah pusat, maupun pola baru hasil susunan pemerintah daerah, mungkin disertai dukungan pemerintah pusat atau swasta di daerah (Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat). Penanggulangan kemiskinan pada akhirnya juga menjadi aspek pembangunan yang tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak secara otomatis mengurangi angka kemiskinan tetapi malah yang terjadi adalah tingkat kesenjangan yang semakin tinggi. Pengalaman dalam penanggulangan kemiskinan pada masa lalu telah memperlihatkan berbagai kelemahan, antara lain : (1) masih berorientasi kepada pertumbuhan makro tanpa memperhatikan aspek pemerataan, (2) kebijakan yang bersifat sentralistik, (3) lebih bersifat karikatif daripada transformatif, (4) memposisikan masyarakat sebagai obyek daripada subyek, (5) orientasi penanggulangan kemiskinan yang cenderung karikatif dan sesaat daripada produktivitas yang berkelanjutan, serta (6) cara pandang dan solusi yang bersifat generik terhadap permasalahan kemiskinan yang ada tanpa memperhatikan kemajemukan yang ada. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, serta dalam pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu

mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya, serta mampu untuk mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya. Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan proses instan. Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan sebagai mekanisme perencanaan dan pembangunan yang bersifat *bottom up* yang melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pembangunan. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan disusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berarti dalam penyusunan tentang program penanggulangan kemiskinan dilakukan penentuan prioritas berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan sehingga implementasi program akan terlaksana secara efektif dan efisien. Melalui pemberdayaan masyarakat akan mampu menilai lingkungan sosial ekonominya serta mampu mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu dilakukan perbaikan. Tahapan selanjutnya dari pemberdayaan adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri berkelanjutan. Mandiri adalah langkah lanjutan yang rasional dari masyarakat yang telah sejahtera.

Kesimpulan : 1) masih berorientasi kepada pertumbuhan makro tanpa memperhatikan aspek pemerataan, 2) kebijakan yang bersifat sentralistik, 3) lebih bersifat karikatif daripada transformatif, 4) memposisikan masyarakat sebagai obyek daripada subyek, 5) orientasi penanggulangan kemiskinan yang cenderung karikatif dan sesaat daripada produktivitas yang berkelanjutan, serta 6) cara pandang dan solusi yang bersifat generik terhadap permasalahan kemiskinan yang ada tanpa dengan memperhatikan kemajemukan yang ada.

References

- Abdurrahman, 1987. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Media Sarana Press.
- Alwi Hashim Batubara, 2006. Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah. Analisis Administrasi Dan Kebijakan ISSN 1412-7377, Volume 3, Nomor 1, Januari - April 2006
- Aris Munandar, 2008. Peran Negara Dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Kajian Politik, dan Masalah Pembangunan, Jurnal Politik Volume 4/No.1/2008
- Berger, O.L. & Nienehaus R.J. 1977. *To Empower People*. Washington DC: American Enterprise Institute for Public Policy Research.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gorontalo: Indeks.
- Gary W. Evans. 2004. The Environment of Childhood Poverty. American Psychologist Vol. 59, No. 2, 77–92.
- Hadi Sasana, 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2011, Hal. 46 – 58 Vol. 18, No. 1, ISSN: 1412-3126.
- J. Edward Taylor dan Thomas Reardon. 1996. Agroclimatic Shock, Income Inequality, and Poverty: Evidence from Burkina Faso. World Development, Vol. 24, No. 5.
- Korten, David C. 1984. *Pembangunan yang Memihak Rakyat*. Jakarta : Lembaga Studi Pembangunan.
- Koirudin. 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*. Malang: Averroes Press.
- Martin Ravallion. 1995. *Growth and poverty: Evidence for developing countries in the 1980s*. Economics Letters 48 (1995) 411-417.
- Martin Ravallion. 1997. *Can high-inequality developing countries escape absolute poverty?*. Economics Letters, Vol. 56 (1997): 51-57
- Mohammad Rofiuddin. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur Dalam Era Otonomi Daerah Tahun 2005-2009. Artikel Publikasi 2012, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012
- Modul Dinas Kesehatan Makassar, 2007. *Penggerakan Dan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Kader dan Tokoh Masyarakat*.
- Freire, Paulo. 1984. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan* (Terj. AA. Nugroho), Jakarta : Gramedia.
- Ravik Karsidi. _____. *Pemberdayaan Masyarakat Petanidan Nelayan Kecil*.
- Syaukani, H., Gaffar, A., dan Rasyid, R. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sikhondze, Wilson B. 1999. The Role of Extension in Farmer Education and Information Dissemination in Swaziland, Journal: Adult Education and Development No. 53/1999, Institute for International Cooperation of The German Adult Education Association, Bonn : 112/DVV.
- Wibawa, Samodra. 2005. *Good Governance Dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.